

PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI PUSKESMAS PADANG BULAN KOTA MEDAN

Cindy Monica Aulia¹, Rezeki Aulia Ramadhani², Adella Syafitri³,

Indah Doanita Hasibuan⁴, Dini Sintia⁵

cindymonicaaulia5@gmail.com¹, rezekiaulia28@gmail.com², adellasyafitri67@gmail.com³,

doanitaindah@uinsu.ac.id⁴, dinisintiapr@gmail.com⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Padang Bulan, Kota Medan. (1) implementasi program bantuan operasional kesehatan (BOK) di tingkat input di Puskesmas Padang Bulan Kota Medan, (2) implementasi program bantuan operasional kesehatan (BOK) di tingkat proses di Puskesmas Padang Bulan, dan (3) pelaksanaan program bantuan operasional kesehatan (BOK) di tingkat output di Puskesmas Padang Bulan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Variabel penelitian meliputi sumber daya manusia, anggaran, pedoman, fasilitas, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian. Sampel yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan operasional kesehatan di Puskesmas Padang Bulan terdiri dari 3 informan yaitu Bendahara Pengelola BOK Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, dan Bendahara Puskesmas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pada level input, kebijakan sumber daya manusia dan buku pedoman teknis target program secara umum belum memadai, jumlah dana perlu di evaluasi dan proses akuntabilitasnya memerlukan pengawasan dan penyederhanaan pelaporan. Pada tingkat proses, implementasi perencanaan harus dilakukan berdasarkan analisis masalah. Pada tingkat output, cakupan layanan ada yang telah meningkat, tetapi ada beberapa layanan yang tidak memenuhi target SPM.

Kata Kunci: Bantuan operasional kesehatan (BOK); puskesmas; input; proses; output.

ABSTRACT

This research aims to determine the utilization of Health Operational Assistance Funds (BOK) at the Padang Bulan Community Health Center, Medan City. (1) implementation of the health operational assistance (BOK) program at the input level at the Padang Bulan Health Center, Medan City, (2) implementation of the health operational assistance (BOK) program at the process level at the Padang Bulan Health Center, and (3) implementation of the health operational assistance program (BOK) at the output level at the Padang Bulan Community Health Center. This research was conducted using a qualitative method with a descriptive approach. Research variables include human resources, budget, guidelines, facilities, planning, implementation, supervision and assessment. The sample involved in implementing the health operational assistance program at the Padang Bulan Community Health Center consisted of 3 informants, namely the Health Service BOK Managing Treasurer, the Head of the Community Health Center, and the Community Health Center Treasurer. The research results reveal that at the input level, human resource policies and technical guidebooks for program targets are generally inadequate, the amount of funding needs to be evaluated and the accountability process requires monitoring and simplifying reporting. At the process level, planning implementation must be carried out based on problem analysis. At the output level, service coverage has increased, but there are several services that do not meet the SPM targets.

Keywords: Health operational assistance (BOK); Public health center; input; process; output.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamankan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 298 ayat (7) menyebutkan belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. Dalam rangka pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman penggunaan anggaran yang berisi penjelasan rincian kegiatan pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); Jaminan Persalinan (Jampersal); Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Rumah Sakit, dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Kemenkes RI, 2019).

Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya terobosan melalui berbagai perubahan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, salah satunya adalah dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). (Naftalin, F., & Ayuningtyas, D, 2020).

BOK adalah Bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu Pemerintahan Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Dana BOK diharapkan dapat mendorong dan mempercepat pembangunan Kesehatan di Indonesia. Peluncuran skema BOK karena dinilai fungsi Puskesmas belum berjalan optimal seperti fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan Kesehatan perorangan primer, pusat pelayanan Kesehatan masyarakat primer, fungsi pusat pemberdayaan masyarakat dan fungsi pusat pembangunan wilayah berwawasan kesehatan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 (Tahun 2020-2024) bahwa Peraturan Menteri Kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan percepatan program pembangunan kesehatan, penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan, serta perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan (Menteri Kesehatan RI, 2022). Program pemberian BOK kepada puskesmas dilakukan secara nasional dengan anggaran yang bersumber dari APBN. Salah satu yang menjadi pertimbangan bahwa kemampuan daerah yang beragam dan banyak daerah yang APBD nya sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai karena rendahnya sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, memutuskan bahwa untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diperlukan dukungan dana transfer ke daerah berupa bantuan operasional kesehatan melalui dana alokasi khusus nonfisik. Pada pasal 5 ayat 1 tentang Besaran Alokasi, dijelaskan bahwa besaran alokasi Dana BOK Puskesmas per Kabupaten/Kota dihitung sesuai dengan formula penghitungan dengan dengan mempertimbangkan kriteria, komponen, dan sumber data.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah bantuan dana dari pemerintah melalui kementerian kesehatan dalam membantu pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Dana BOK diharapkan dapat mendorong dan mempercepat pembangunan kesehatan di Indonesia. Peluncuran dana BOK karena dinilai fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, pusat pelayanan masyarakat primer, fungsi pusat pemberdayaan masyarakat dan fungsi

pembangunan wilayah berwawasan kesehatan. BOK merupakan dana bantuan operasional kesehatan yang diberikan oleh pusat langsung ke daerah untuk mendukung pencapaian target nasional dalam meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya. Dana BOK ini diatur secara tersendiri, dan penyaluran serta pemanfaatannya diatur oleh pemerintah pusat untuk memastikan kelancaran dan maksimalnya pemanfaatan dana tersebut.

Dengan adanya bantuan dana operasional kesehatan (BOK) Puskesmas diharapkan derajat kesehatan masyarakat pun meningkat dengan melihat indikator target SPM dan program dapat terlaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Naftalin, F., & Ayuningtyas, D, 2020) dengan judul “Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kranji Di Kota Bekasi” dengan tujuan melihat pengelolaan dana BOK tersebut membuat peneliti tertarik. Dibandingkan penelitian terdahulu, untuk penelitian kali ini dilakukan pada alokasi dana BOK Puskesmas Padang Bulan di Kota Medan dengan karakteristik jenis puskesmas UPT. Pengalokasian dana BOK Puskesmas sebagaimana dalam (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2023, 2024) terdapat 14 menu kegiatan BOK puskesmas diantaranya adalah mendukung pelaksanaan percepatan penurunan AKI dan AKB terutama dalam bentuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif, mendukung pelaksanaan percepatan perbaikan gizi masyarakat, mendukung pelaksanaan upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit, mendukung upaya gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), mendukung pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan BMHP, mendukung penguatan koordinasi tata kelola UKM sekunder, mendukung dukungan akreditasi RS D Pratama, mendukung pelaksanaan akreditasi FKTP, mendukung penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah menuju BSL-2, mendukung pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses, mendukung pelaksanaan kolaborasi puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas, mendukung pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan Puskesmas, mendukung pelatihan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk topik prioritas, dan mendukung peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kader kesehatan untuk topik prioritas. Maka dari itu, perlu adanya tinjauan ulang terkait implementasi dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas melalui penelitian yang dilakukan kali ini.

Tujuan penelitian ini untuk melakukan evaluasi terhadap program Dana Bantuan Operasional Kesehatan melalui pendekatan sistem dilihat dari input, proses dan output.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan 3 informan. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Puskesmas Padang Bulan dan Bendahara/penanggung jawab BOK Puskesmas Padang Bulan, sedangkan informan triangulasi dalam penelitian ini yaitu Bendahara Pengelola BOK Dinas Kesehatan Kota Medan. Variabel penelitian meliputi sumber daya manusia, anggaran, pedoman, fasilitas, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode indepth interview terhadap informan utama maupun informan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Matriks Hasil Penelitian dari Tahap Input

No	Indicator	Memadai	Tidak Memadai	Keterangan
1	Kebijakan	√		Dana BOK termasuk dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 37/MENKES/PER/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
2	SDM/ Tenaga Pengelola Program	√		Kepala Puskesmas adalah penanggung jawab dari pengelolaan dana BOK di Puskesmas Padang Bulan dan Bendahara/Penanggung jawab BOK di Puskesmas Padang Bulan.
3	Dana	√		Dana alokasi khusus bidang kesehatan.
4	Sasaran Program	√		Sasaran program dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah untuk mendukung dan memenuhi ketentuan dari juknis tentang pengalokasian Dana BOK dalam bentuk program yang telah ditentukan Kemenkes. Untuk meningkatkan pelayanan dan mendukung kegiatan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Tabel.2 Matriks Hasil Penelitian dari Tahap Proses

No	Indicator	Memadai	Tidak Memadai	Keterangan
1	Perencanaan	√		Perencanaan program dilaksanakan awal tahun dalam bentuk POA (juknis), mulai dari jenis kegiatan dan volume kegiatan.
2	pengorganisasian	√		Kepala puskesmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
3	Pelaksanaan	√		Puskesmas sebagai pelaksana program dalam melaksanakan program berdasarkan POA (juknis) yang telah disetujui oleh tim penanggung jawab di Pemerintah Kota Medan.

4	Pelaporan	√	Laporan bulanan atau setelah kegiatan dilaksanakan oleh puskesmas sudah berjalan dengan baik.
5	Pemantauan Atau Monitoring	√	Monitoring program BOK di Puskesmas Padang Bulan diakui pengelola sudah berjalan secara baik.

Tabel.3 Matriks Hasil Penelitian dari Tahap Output

No	Indicator	Memadai	Tidak Memadai	Keterangan
1	Terlaksananya Program BOK	√		Program bantuan operasional kesehatan sudah terlaksana dari puskesmas, dan telah berjalan secara maksimal.
2	Tercapainya Cakupan Program	√		Cakupan pelayanan telah meningkat, dan sudah sesuai dengan target capaian SPM di puskesmas.

PEMBAHASAN

Input

1. Kebijakan

Dana BOK diharapkan dapat meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat utamanya kegiatan promotif dan preventif untuk mewujudkan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Menurut Thomas Dye (Naftalin, F., & Ayuningtyas, D, 2020) kebijakan meliputi apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Kebijakan disini merupakan keputusan yang dibuat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal.

Menurut Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (Naftalin, F., & Ayuningtyas, D, 2020) kebijakan hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Memilih untuk menjalankan suatu kebijakan dikarenakan dalam kebijakan tersebut berisi nilai-nilai serta praktika sosial di masyarakat yang kemudian dipilih untuk dilaksanakan demi terwujudnya suatu tujuan.

2. SDM/ Tenaga Pengelola Program

Manusia dalam hal ini petugas kesehatan adalah ujung tombak dalam pelaksanaan program BOK. Peran dan keberadaan mereka dalam program ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program di puskesmas oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan manusia yang terampil dan berkualitas. Tenaga pengelola BOK di tingkat puskesmas adalah tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh kepala puskesmas untuk membantu bendahara puskesmas membuat dokumen pertanggungjawaban BOK. Kepala Puskesmas dan Bendahara Pengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas yang terlibat sebagai SDM guna menjalankan program dengan pencapaian targer sasaran dan SPM Puskesmas.

3. Dana

Dana program Bantuan Operasional Kesehatan adalah dana alokasi khusus bidang kesehatan dalam bentuk Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Proses

1. Perencanaan

Tahap perencanaan ini dalam mengimplementasikan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Padang Bulan memerlukan kegiatan dalam penyusunan dan perancangan penggunaan dana, lalu dari sisi gambaran jadwal pelaksanaannya, hingga hambatan yang dirasakan dalam tahap tersebut.

Pada awalnya puskesmas menyusun perencanaan tahunan yang tergambar dalam POA berdasarkan PTP (Perencanaan Tingkat Puskesmas), namun menurut peneliti standar perencanaan dalam program BOK berdasarkan juknis adalah tersusunnya POA di tingkat Puskesmas oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwa proses perencanaan telah memadai oleh karena hasil uji validasi data yang telah dilakukan diketahui bahwa semua Puskesmas sudah menyusun POA.

Dalam tahap perencanaan variabel juknis, bahwa dapat dikatakan hasil triangulasi variabel juknis informan menjawab bahwa adanya juknis dalam implementasi penggunaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas Padang Bulan, terdapat informan yang jelas menjawab dengan tepat bahwa petunjuk dan teknis dalam menggunakan dana BOK ini pada tahun 2023 tersebut mengacu pada (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan 2023, 2024). Untuk variabel program prioritas hasil triangulasi informan menjelaskan bahwa dalam tahap perencanaan ini terdapat kegiatan mini lokakarya guna mendiskusikan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam tahun berjalan menggunakan sumber dana BOK Puskesmas dan juga membahas mengenai program-program prioritas baik di tingkat puskesmas maupun tingkat programmer sendiri. Untuk variabel pihak yang terkait dalam tahap perencanaan BOK ini menunjukkan hasil triangulasi informan menjawab tim yang terkait termasuk lintas sektor ikut dalam tahap perencanaan.

Terkait SPM pun seluruh informan mengetahui adanya target yang diberikan oleh dinas kesehatan untuk dicapai oleh masing-masing programmer terkait dalam menjalankan kegiatan yang bersumber dari dana BOK tersebut.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas merupakan aspek penting untuk memastikan penggunaannya secara efektif dan efisien. Pengorganisasian program BOK telah tercantum dalam petunjuk teknis dimana penanggung jawab di Tingkat Kabupaten adalah Kepala Dinas Kesehatan dan ditingkat Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.

Puskesmas Padang Bulan sudah memiliki struktur organisasi yang jelas terkait pengelolaan dana BOK. Kepala Puskesmas berperan sebagai penanggung jawab utama, dan dibantu oleh tim-tim pengelola yang terdiri dari unsur-unsur terkait, salah satunya Bendahara/ pengelola dana BOK puskesmas. Penetapan tim pengelola bisa melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Puskesmas yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Tim nya berasal dari KPA lalu ke PPTK, dan kemudian ke Bendahara Pengelola BOK.

3. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program BOK di Puskesmas Padang Bulan Kota Medan, dalam proses pelaksanaannya sudah sesuai perencanaan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis telah ditentukan.

Dalam tahap pelaksanaan variabel kesesuaian pelaksanaan dengan POA, didapatkan hasil triangulasi bahwa informan menyatakan telah sesuai perencanaan antara tahap pelaksanaan kegiatan dengan rencana POA awal.

4. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan program diharapkan masuk setiap bulan atau setiap selesai kegiatan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota Medan. Puskesmas Padang Bulan setiap bulan nya atau setiap menyelesaikan kegiatan program ada pelaporan dengan membuat laporan, buku kesehatan, buku bank, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), lalu kemudian realisasi dana akan keluar lagi setelah salah satu kegiatan program selesai. Walaupun informan berpesan bahwa dana BOK segera bisa masuk pada awal tahun berjalan, jadi informan berharap dana BOK bisa masuk tepat waktu.

Berdasarkan data tersebut peneliti berkesimpulan bahwa sistem pelaporan program BOK di Puskesmas sudah menjalankan tugas dan memenuhi perencanaan awal. Dan diharapkan untuk Dinas Kesehatan Kota Medan dalam ketepatan waktunya mengeluarkan dana BOK. Agar Puskesmas dapat tepat waktu juga menjalankan programnya dengan capaian yang maksimal.

Keterlambatan dalam pengeluaran dana BOK akan berdampak dengan kesesuaian target yang akan dicapai oleh Puskesmas. Dan pada akhirnya akan menghambat capaian program sesuai yang diharapkan.

5. Pemantauan/ Monitoring

Pemantauan dan monitoring Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Padang Bulan Kota Medan merupakan kegiatan penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai kemajuan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi kendala, dan melakukan koreksi yang diperlukan.

Pemantauan dan monitoring yang dilakukan pada program BOK oleh tim pengelola BOK disetiap tingkat Puskesmas ditujukan agar dana BOK dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan sehingga dapat memberikan hasil seoptimal mungkin. Pemantauan dan monitoring tersebut di Puskesmas Padang Bulan telah berjalan secara maksimal khususnya pengawasan yang dilakukan ditingkat Puskesmas oleh Kepala Puskesmas.

Output

1. Penilaian/ Evaluating

Berikut hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen yaitu :

1. Terlaksananya Program BOK

Berdasarkan analisa terhadap POA Puskesmas menunjukkan banyaknya kegiatan yang bersifat promotif dan preventif dan sudah sepenuhnya dilaksanakan karena sesuai dengan SDM yang ada dengan capaian SPM.

2. Capaian Cakupan Program

Realisasi kinerja fisik sudah menempati target, dan kadang realisasi kinerja keuangannya masih sedikit terkendala untuk mencapai target. Hal ini disebabkan oleh: dana BOK yang tidak tepat waktu dikeluarkan, adanya tugas tambahan selain dari tupoksi pemegang program, dan rumitnya alur sistem pencairan dana BOK hingga masuk ke rekening penerima dana BOK.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahap input: Menyangkut Kebijakan SDM / tenaga pengelola, Buku Pedoman/Juknis Sasaran program sudah memadai kecuali menyangkut ketepatan waktu dalam pengeluaran dana, perlu dievaluasi pada ketepatan waktu anggaran serta perlu pembinaan proses pertanggung jawaban yang masih perlu pembimbingan dan penyederhanaan pelaporan. Pelaksanaan program Dana

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahap proses: menyangkut Perencanaan, Pengorganisasian Pelaksanaan, Pelaporan Pemantauan atau monitoring pada umumnya sudah berjalan sesuai perencanaan awal. Dalam menjalankan program tidak terlepas dari pengawasan oleh Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan agar berjalan secara maksimal. Pelaksanaan program Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahap output: menyangkut Terlaksananya program bantuan operasional kesehatan dan Tercapainya cakupan program. Penulis berharap agar program dana Bantuan Operasional Kesehatan kedepannya dapat dipertahankan dan ketepatan waktu dalam pengeluaran anggarannya perlu ditingkatkan agar cakupan kegiatan bisa lebih dilaksanakan tepat waktu serta diperlukan pembimbingan dan pengawasan yang lebih baik agar pelaksanaan program dana BOK dapat mencapai cakupan sesuai SPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia Setyo Probo Rini, A. (2022). Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) di UPT Puskesmas Sibela Surakarta (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS KUSUMA HUSADA SURAKARTA).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. Kepmenkes RI, Nomor 37/Menkes/Per/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
- Kementerian Kesehatan RI. Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan. Indonesia: Kemenkes RI; 2019.
- Kota, L. P. Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Pelayanan Pada Puskesmas Rawat Inap Di Kabupaten.
- Naftalin, F., & Ayuningtyas, D. (2020). Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Kranji Di Kota Bekasi. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 95-103.
- Nuryana, H., Usman, A., & Rahayu, S. (2023). Implementasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas X Kota Bogor tahun 2022. *PROMOTOR*, 6(1), 16-25.
- Rencana Strategi. Kepmenkes RI, Nomor 21 Tahun 2020 (2020-2024) tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Kemenkes RI; 2022.